

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA SURABAYA MELALUI PROGRAM JAWA TIMUR BELANJA ONLINE

Farhan Bhagaskara Handoko¹, Ertien Rining Nawangsari²

Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email Korespondensi: 22041010136@student.upn.ac.id

Email: ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector in Surabaya through the East Java Online Shopping Program (Jatim Bejo). The Jatim Bejo Program is a digital-based empowerment program developed by the East Java Provincial Government to expand MSME involvement in government procurement of goods and services through online marketplaces. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation with informants consisting of staff from the East Java Provincial Goods/Services Procurement Bureau, MSMEs in the food and beverage sector, and regional government agencies (OPD) using the program. The research analysis uses the empowerment theory according to Suaib (2023) which includes indicators of welfare, access, critical awareness, participation, and control. The results show that the Jatim Bejo Program is able to improve the welfare of MSMEs by increasing turnover and expanding the market. This program also provides easy access to government markets, training, mentoring, and the use of digital technology. In addition, the program encourages increased awareness among MSMEs regarding the importance of product quality, business legality, and professionalism in running a business. The level of participation of MSMEs in socialization and the use of digital platforms is also relatively high. Regarding the control indicator, a transparent and structured transaction system provides a sense of security and fairer opportunities for MSMEs in the government procurement process. However, obstacles remain, including transaction inequality between business actors and a low understanding of digital technology among some MSMEs. Therefore, increased mentoring and system development are needed to ensure the program's benefits are more evenly distributed.

Keywords: Empowerment, Programs, MSMEs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman di Kota Surabaya melalui Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Program Jatim Bejo merupakan bentuk pemberdayaan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui marketplace daring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, pelaku UMKM makanan dan minuman, serta pihak OPD pengguna program. Analisis penelitian menggunakan teori pemberdayaan menurut Suaib (2023) yang meliputi indikator kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jatim Bejo mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM melalui peningkatan omzet dan perluasan pasar. Program ini juga memberikan kemudahan akses terhadap pasar pemerintah, pelatihan, pendampingan, dan penggunaan teknologi digital. Selain itu, program mendorong meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

pentingnya kualitas produk, legalitas usaha, dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam sosialisasi dan penggunaan platform digital juga tergolong tinggi. Pada indikator kontrol, sistem transaksi yang transparan dan terstruktur memberikan rasa aman serta kesempatan yang lebih adil bagi pelaku UMKM dalam proses pengadaan pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa ketimpangan transaksi antar pelaku usaha dan rendahnya pemahaman teknologi digital pada sebagian UMKM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendampingan dan pengembangan sistem agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

Kata kunci: Pemberdayaan, Program, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dikutip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2025), UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berkontribusi terhadap kinerja ekspor nasional sebesar 15,7% sehingga pemerintah terus mendorong pengembangan UMKM agar mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi maupun pandemi COVID-19.

UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun kelompok usaha dengan skala kecil hingga menengah. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar UMKM masih menggunakan sistem pengelolaan usaha yang sederhana, modal yang terbatas, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Mayoritas pelaku UMKM juga masih mengandalkan pemasaran secara tradisional dan menjangkau pasar lokal maupun regional. Meskipun demikian, UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang cukup tinggi serta mampu menghasilkan produk kreatif yang memiliki nilai lokal, seperti kuliner daerah, kerajinan tangan, dan produk berbasis budaya. Di sisi lain, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menghadirkan berbagai tantangan baru bagi UMKM, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses pasar, kurangnya inovasi produk, legalitas usaha, hingga keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan dan pemberdayaan dari pemerintah agar UMKM mampu berkembang dan bersaing di era digital.

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan, akses, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks UMKM, pemberdayaan dilakukan agar pelaku usaha memiliki kemampuan untuk berkembang, meningkatkan kualitas usaha, serta mampu menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dan regulator dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan, program pelatihan, pendampingan, serta pemberian akses terhadap pasar dan pembiayaan. Menurut Salehuddin et al. (2021), pemerintah perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membangun kemitraan yang mendukung perkembangan UMKM agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (2024), jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 9,78 juta unit usaha. Besarnya jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian dan

dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar agar UMKM mampu meningkatkan daya saing produknya (Nurhalita, 2022). Namun, sebelum adanya program digitalisasi dari pemerintah, sebagian besar UMKM di Jawa Timur masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya kemampuan penggunaan teknologi digital, pemasaran yang masih dilakukan secara konvensional, serta keterbatasan dalam pengelolaan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Satria et al. (2024) menunjukkan bahwa UMKM di Jawa Timur masih mengalami kendala dalam pemasaran digital dan pengemasan produk sehingga berdampak pada lambatnya perkembangan usaha dan keterbatasan pasar yang dapat dijangkau.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian menghadirkan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) sebagai salah satu bentuk pemberdayaan UMKM berbasis digital. Program Jatim Bejo merupakan program pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui marketplace dan platform digital yang bertujuan untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam sistem pengadaan pemerintah. Program ini tidak hanya menjadi media transaksi dan promosi produk, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas usaha dan daya saing produk. Penelitian Sayyidah (2025) menjelaskan bahwa Program Jatim Bejo mampu membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas melalui keterlibatan langsung dalam sistem pengadaan pemerintah daerah. Selain itu, UMKM yang mengikuti program ini mengalami peningkatan pendapatan sekitar 45–60% setelah bergabung dalam Program Jatim Bejo (Sayyidah, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha UMKM, baik dari sisi ekonomi maupun perubahan pola pikir pelaku usaha menuju usaha yang lebih modern dan berbasis digital.

Program Jatim Bejo dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang pemanfaatan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, Program Jatim Bejo bekerja sama dengan beberapa marketplace, seperti Mbizmarket, Gratis Ongkir, Indotrading, Tokogramedia, dan Toko Ladang. Program ini juga didukung dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu memahami penggunaan sistem digital dalam proses transaksi pengadaan pemerintah.

Berdasarkan data Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur (2026), jumlah UMKM yang bergabung dalam Program Jatim Bejo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa program ini mampu menarik minat pelaku UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program ini mencakup berbagai kategori usaha, seperti makanan dan minuman, perlengkapan kantor, jasa percetakan, hingga produk teknologi informasi. Dari berbagai kategori tersebut, kategori makanan dan minuman menjadi kategori dengan jumlah transaksi tertinggi karena hampir seluruh kegiatan OPD membutuhkan penyediaan konsumsi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tingginya transaksi pada kategori makanan dan minuman menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki peluang besar dalam mendukung perkembangan usaha pelaku UMKM.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Berdasarkan data transaksi marketplace Jatim Bejo, masih terdapat ketimpangan jumlah pemesanan antar pelaku UMKM, di mana hanya UMKM tertentu yang lebih banyak menerima pesanan dibandingkan UMKM lainnya. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami penggunaan teknologi digital, kesulitan dalam melakukan upload produk, menentukan harga, serta memahami mekanisme transaksi digital. Rendahnya literasi digital dan keterbatasan pemahaman terhadap sistem pengadaan pemerintah menjadi salah satu hambatan yang memengaruhi partisipasi pelaku UMKM dalam Program Jatim Bejo. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan program pemberdayaan dengan pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Makanan dan Minuman di Kota Surabaya Melalui Program Jawa Timur Belanja Online”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Program Jatim Bejo dalam memberdayakan pelaku UMKM, khususnya kategori makanan dan minuman di Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan program pemberdayaan UMKM agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun kelompok usaha dengan skala kecil hingga menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan jumlah kekayaan bersih serta hasil penjualan tahunan yang dimiliki. Dalam perkembangannya, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti modal usaha yang terbatas, rendahnya kemampuan manajemen usaha, kurangnya pemanfaatan teknologi digital, hingga keterbatasan akses pasar dan informasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM membutuhkan dukungan dan pemberdayaan agar mampu berkembang dan bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Suaib (2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui lima indikator, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Teori ini dipilih karena dianggap relevan dengan fokus penelitian yang membahas proses pemberdayaan UMKM melalui Program Jatim Bejo. Melalui teori tersebut, peneliti dapat menganalisis bagaimana program pemerintah tidak hanya memberikan bantuan secara ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan, keterlibatan, serta kemandirian pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Indikator kesejahteraan digunakan untuk melihat sejauh mana Program Jatim Bejo mampu meningkatkan kondisi ekonomi pelaku UMKM, seperti peningkatan omzet, pendapatan usaha, serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup setelah bergabung dalam program. Indikator ini penting karena kesejahteraan menjadi salah satu tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebelumnya memiliki keterbatasan pasar dan pendapatan usaha. Selanjutnya, indikator akses digunakan untuk mengetahui kemudahan pelaku UMKM dalam memperoleh sumber daya dan manfaat program, seperti akses terhadap pasar pemerintah, penggunaan platform digital, informasi, pelatihan, hingga pendampingan usaha yang diberikan oleh pengelola program.

Kemudian, indikator kesadaran kritis digunakan untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberlangsungan usaha mereka. Kesadaran kritis menjadi penting karena pemberdayaan tidak hanya berfokus pada bantuan sesaat, tetapi juga bagaimana pelaku UMKM memiliki pola pikir yang berkembang dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Selain itu, indikator partisipasi digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam pelaksanaan program, baik melalui keikutsertaan dalam sosialisasi, bimbingan teknis, penggunaan marketplace, maupun keterlibatan dalam proses transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sementara itu, indikator kontrol digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengikuti serta memanfaatkan Program Jatim Bejo tanpa adanya diskriminasi maupun ketimpangan. Indikator ini juga digunakan untuk melihat apakah seluruh pelaku UMKM memperoleh peluang yang adil dalam menampilkan produk, mendapatkan akses pasar, dan mengikuti proses pengadaan pemerintah secara transparan. Dengan menggunakan lima indikator pemberdayaan menurut Suaib (2023), penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih

mendalam mengenai proses pemberdayaan UMKM melalui Program Jawa Timur Belanja Online, sekaligus mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai tujuan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM kategori makanan dan minuman di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji pemberdayaan UMKM melalui program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) sehingga menjawab fenomena yang sedang terjadi. Penelitian dilaksanakan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana program Jatim Bejo. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat Suaib 2023 sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan UMKM yang ditinjau dari indikator: Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi, dan Kontrol. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan literatur yang relevan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap program Jatim Bejo, yang meliputi staf Biro Pengadaan Barang/Jasa, pelaku UMKM makanan dan minuman, serta pihak OPD pengguna program. Teknik pengumpulan data menggunakan metode (Yusuf, 2017)) yaitu dengan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data menggunakan model (Miles B. et al., 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi dan member check untuk memastikan validitas dan konsistensi data penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Program Jatim Bejo menunjukkan adanya peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan pelaku UMKM makanan dan minuman melalui pemanfaatan sistem digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program ini dibentuk sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM agar dapat terlibat secara langsung dalam pengadaan pemerintah, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pasar umum atau pelanggan tetap yang dimiliki sebelumnya. Kehadiran Program Jatim Bejo juga menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk lokal serta mendorong perkembangan UMKM agar mampu bersaing di era digital. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya berfokus pada proses transaksi, tetapi juga memberikan pendampingan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar lebih memahami mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan teori pemberdayaan menurut Suaib (2023), keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat melalui lima indikator, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Pada indikator kesejahteraan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jatim Bejo memberikan dampak terhadap peningkatan kondisi ekonomi pelaku UMKM makanan dan minuman. Sebagian besar pelaku usaha menyampaikan bahwa setelah bergabung ke dalam program, usaha mereka mengalami peningkatan omzet dan memperoleh tambahan pasar baru, khususnya dari lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum mengikuti program, beberapa pelaku UMKM hanya mengandalkan pelanggan tetap atau pemasaran secara manual, namun setelah bergabung mereka mulai mendapatkan peluang transaksi dengan OPD yang sebelumnya sulit dijangkau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ini mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan dan menjaga keberlangsungan usahanya. Selain itu, meningkatnya jumlah pesanan juga membuat pelaku UMKM lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar tetap mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Pada indikator akses, Program Jatim Bejo memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh akses pasar pemerintah melalui sistem digital yang lebih praktis dan transparan. Sebelumnya, pelaku UMKM cenderung mengalami kesulitan untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena prosedurnya dianggap rumit dan membutuhkan berbagai persyaratan administrasi. Namun, melalui

Program Jatim Bejo, pelaku usaha diberikan kemudahan untuk menawarkan produknya secara langsung kepada OPD melalui marketplace yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Selain akses pasar, pelaku UMKM juga memperoleh akses terhadap berbagai bentuk dukungan seperti pelatihan, sosialisasi, legalitas usaha, hingga akses pembiayaan melalui kerja sama dengan beberapa instansi. Adanya kemudahan akses tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Bahkan bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum memiliki relasi atau jaringan pasar yang luas, program ini menjadi peluang baru untuk memperkenalkan produk mereka kepada instansi pemerintah.

Pada indikator kesadaran kritis, Program Jatim Bejo mendorong pelaku UMKM untuk lebih memahami pentingnya kualitas produk, legalitas usaha, perpajakan, serta profesionalisme dalam menjalankan usaha. Pelaku UMKM mulai menyadari bahwa untuk dapat bertahan dan bersaing dalam pengadaan pemerintah, mereka harus mampu menjaga kualitas produk, konsistensi pelayanan, serta memenuhi standar yang telah ditentukan. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi produk, memperbaiki kualitas kemasan, serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Selain itu, program ini juga membuat pelaku UMKM lebih sadar terhadap pentingnya penggunaan teknologi digital dalam mendukung perkembangan usaha di era modern. Kesadaran tersebut menjadi salah satu bentuk perubahan pola pikir pelaku usaha yang sebelumnya masih menjalankan usaha secara sederhana menjadi lebih profesional dan siap menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dengan demikian, Program Jatim Bejo tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membantu meningkatkan pola pikir dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Pada indikator partisipasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program Jatim Bejo. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, hingga penggunaan platform digital dalam proses transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beberapa pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa mereka aktif mencari informasi dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pengelola program agar dapat memahami penggunaan sistem dengan lebih baik. Selain itu, apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi atau proses transaksi, pelaku usaha juga aktif berkomunikasi dengan pengelola maupun admin marketplace untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga ikut berperan dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan Program Jatim Bejo. Keterlibatan aktif pelaku usaha dalam berbagai kegiatan program juga membantu meningkatkan efektivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada indikator kontrol, Program Jatim Bejo telah menyediakan sistem transaksi yang transparan dan terstruktur sehingga memberikan rasa aman kepada pelaku UMKM selama proses pengadaan berlangsung. Seluruh proses transaksi dilakukan secara elektronik dan dapat dipantau mulai dari pemesanan, proses pembayaran, hingga penyelesaian transaksi. Selain itu, terdapat SOP, layanan pengaduan, nomor pesanan, serta pendampingan dari pengelola yang membantu pelaku UMKM apabila mengalami kendala selama penggunaan sistem. Transparansi dalam sistem tersebut membuat pelaku usaha merasa lebih terlindungi dan percaya terhadap mekanisme pengadaan yang dijalankan. Pelaku UMKM juga memiliki kesempatan yang sama dalam menawarkan produk kepada OPD sehingga dapat meminimalisir adanya praktik yang tidak adil dalam proses pengadaan. Dengan adanya sistem kontrol yang jelas dan terbuka, hubungan antara pemerintah dan pelaku UMKM menjadi lebih baik serta mampu menciptakan proses pengadaan yang lebih akuntabel dan profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan pelaku UMKM makanan dan minuman melalui Program Jatim Bejo di Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM. Program Jatim Bejo tidak hanya menjadi sarana transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga menjadi media pemberdayaan yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing usaha. Berdasarkan teori pemberdayaan menurut Suaib (2023), Program Jatim Bejo telah memenuhi lima indikator pemberdayaan, yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Pada indikator kesejahteraan, program ini mampu membantu meningkatkan omzet dan peluang usaha pelaku UMKM melalui keterlibatan dalam pengadaan pemerintah. Pada indikator akses, pelaku UMKM memperoleh kemudahan dalam memasarkan produk, memperoleh informasi, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Pada indikator kesadaran kritis, pelaku UMKM menjadi lebih memahami pentingnya kualitas produk, legalitas usaha, serta profesionalisme dalam menjalankan usaha. Pada indikator partisipasi, pelaku UMKM menunjukkan keterlibatan aktif dalam mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, dan penggunaan platform Jatim Bejo. Sementara itu, pada indikator kontrol, program ini telah menyediakan sistem transaksi yang transparan, terstruktur, dan memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM selama proses pengadaan berlangsung. Secara keseluruhan, Program Jatim Bejo telah berperan dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM makanan dan minuman di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti belum meratanya transaksi yang diperoleh pelaku UMKM serta keterbatasan pemahaman penggunaan sistem bagi sebagian pelaku usaha, sehingga diperlukan pengembangan program yang lebih optimal agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem digital. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pengelola Program Jatim Bejo dengan OPD agar penggunaan produk UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat lebih dimaksimalkan. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami penggunaan sistem, meningkatkan kualitas usaha, serta memperoleh peluang transaksi yang lebih merata. Selain itu, pengelola Program Jatim Bejo diharapkan dapat terus melakukan inovasi dan pengembangan sistem, salah satunya dengan mengubah platform Jatim Bejo yang saat ini berbasis website menjadi aplikasi digital yang lebih praktis dan mudah digunakan melalui telepon genggam. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya memudahkan transaksi di lingkungan pemerintah, tetapi juga memungkinkan masyarakat umum di seluruh Jawa Timur untuk ikut menggunakan aplikasi tersebut. Dengan demikian, produk UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dikenal oleh lebih banyak masyarakat, serta mampu meningkatkan perkembangan dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Afdhal, A., Mustanir, A., Ilmi, A., Aksal, F., Iwan, M., Kusnadi, H., Fauzan, R., Duwi, A., Rina, S., & Abdurohim, W. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Nurhalita, S. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LANGKAT (THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN EMPOWERMENT OF MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN LANGKAT REGENCY).
- Numfor, A. P. O. D. K. B. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Orang.
- Pahleviannur, A. De Grave, D.N. Saputra, D. Mardianto, D. Sinthania, L. Hafrida, V.O. Bano, E.E. Susanto, A.J. Mahardhani, A., M. D. S. A., M. Lisyah, & D.B. Ahyar. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv. Pradina Pustaka Grup. <https://doi.org/10.31237/0sf.Io/Jhxiuw>.
- Satria, A. R., & Prathama, A. (2023). East Java Online Shopping at the Regional Secretariat of East Java Province. *Natapraja*, 11(1), 52-59.
- Salehuddin, S., Maswati, R., & Samar, S. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor. *Sosio E-Kons*, 13(3), 243. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v13i3.10771>

Suaib. (2023). *PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN*.

Syakhirul Alim, W., Orba Manullang, S., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Marendah Ratnaningtyas, E., Sulandjari, K., Wulandari, R., & Efendi, Y. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi*. www.gaptek.id

Tulus Tambunan. (2009). *UMKM di Indonesia*

Udmi Sayyidah. "Implementation of the East Java Online Shopping Program to Increase MSME Income in Malang City." *Al-Maqrizi: Journal of Islamic Economics and Islamic Studies Sharia Economics Study Program*, vol. Vol 3. No. 2, 2025.

Yulita, T. (2020). Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6, 95.

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.